



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SALINAN

KEPUTUSAN

**SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA
PENGGUNA BARANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG KOORDINATOR
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA UNIT
ORGANISASI ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap daftar Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2021 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Barang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Barang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang

Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA UNIT ORGANISASI ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Barang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 3 September 2021
SEKRETARIS UTAMA SELAKU
KUASA PENGGUNA BARANG
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU
KUASA PENGGUNA BARANG LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU
KUASA PENGGUNA BARANG LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
UNIT ORGANISASI ESELON II DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 34 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
UNIT ORGANISASI ESELON II TAHUN ANGGARAN 2021
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Unit Organisasi Eselon II
1	Penanggung Jawab	:	Shahandra Hanitiyo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
2	Ketua	:	Muhammad Adiwibowo Soedarmo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
3	Sekretaris	:	Sulmiari	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
4	Anggota	:	1. Mia Diana Putri Suryadi	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
			2. Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum

		3. Deddy Andrianto	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		4. Adi Irawan	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		5. Gendy Marthatomo Rachmanto	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		6. Hans Heru Troyas	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		7. Nur Hartoyo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		8. Rati Karimah	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		9. Andi Setya Nugraha	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		10. Sazzali	Inspektorat
		11. Yoga Nurdani	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
		12. Milania Pradani	Biro Perencanaan dan Keuangan
		13. Martdetiara Dewi Kartika	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		14. Andi Rannualdi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		15. Hima Tussafinah	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

		16. Mahendra Gilang Ramadhynara	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		17. Himawan Giri Dahlan	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
		18. L. Rani Esi Hapsari	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
		19. Fuady Satria	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		20. Muhammad Darwis Rambe	Direktorat Pengembangan Profesi
		21. Ade Wahyu Kurniawan	Direktorat Sertifikasi Profesi
		22. Aisyah Khoirun Nisa	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		23. Paramitha Agdina Pusparini	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		24. Sigit Apriyanto	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

SEKRETARIS UTAMA SELAKU
KUASA PENGGUNA BARANG
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

ROBIN ASAD SURYO